



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MAJENE
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan standar biaya umum Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Majene Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
2. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
3. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

4. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
6. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majene untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2016.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 dapat berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (3) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan penggunaan Standar Biaya Umum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran di atur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Majene tersendiri.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nopmor 25 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Majene ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 23.

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2016STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PENGANGGUNG JAWAB/PENGELOLA KEUANGAN/TAPD			
	1.1. PENGELOLA KEUANGAN			
	a. BENDAHARA PENGELUARAN			
	- Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta	OB	350,000	
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	400,000	
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	450,000	
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar ke atas	OB	500,000	
	b. BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	OB	700,000	
	c. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	600,000	
	d. PEMBANTU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	500,000	
	e. PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	350,000	
	f. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)	OB	400,000	
	g. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OB	250,000	
	h. BENDAHARA PENERIMAAN	OB	300,000	
	i. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	OB	150,000	
	j. BENDAHARA BENDA BERHARGA	OB	250,000	
	k. STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)	OB	150,000	
	l. STAF BENDAHARA	OB	150,000	
	m. PEMBUAT DAFTAR GAJI / JURU BAYAR GAJI	OB	250,000	
	1.2. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)			
	1.2.1 a. Pengarah	OK	2,100,000	
	b. Ketua	OK	1,900,000	
	c. Wakil Ketua	OK	1,850,000	
	d. Sekretaris	OK	1,800,000	
	e. Wakil Sekretaris	OK	1,750,000	
	f. Koordinator Bidang	OK	1,750,000	
	g. Anggota	OK	1,550,000	
	1.2.2 Sekretariat Tim Anggaran			
	a. Koordinator	OK	1,600,000	
	b. Anggota	OK	1,500,000	
	1.3. PENGELOLAAN KEUANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	1.3.1. TIM TEKNIS			
	ADMINISTRATOR			
	a. Koordinator	OB	750,000	
	b. Tim Administrator	OB	650,000	
	JARINGAN			
	a. Koordinator	OB	450,000	
	b. Anggota	OB	400,000	
	OPERATOR			
	a. Operator	OB	400,000	
	1.4. PENGELOLA PBB P2			
	a. Pendata	OP	8,000	
	b. Pendamping	OP	2,000	
	c. Penginput	OP	2,000	
2	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA /UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	2.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA			
	a. Penjabat Pengadaan Barang/Jasa	OP	365,000	Maks. 1 Orang
	2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	Per paket	365,000	Maks. 1 Orang
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OP	550,000	Maks. 3 Orang

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 200 juta	OP	700,000	Maks. 3 Orang
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	850,000	Maks. 3 Orang
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	1,050,000	Maks. 5 Orang
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	1,200,000	Maks. 5 Orang
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	1,350,000	Maks. 5 Orang
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	1,700,000	Maks. 5 Orang
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	1,900,000	Maks. 7 Orang
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	2,000,000	Maks. 7 Orang
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	2,200,000	Maks. 7 Orang
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OP	2,650,000	Maks. 7 Orang
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OP	3,100,000	Maks. 7 Orang
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OP	3,500,000	Maks. 7 Orang
	2.3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	Per paket	365,000	Maks. 1 Orang
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OP	500,000	Maks. 3 Orang
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 200 juta	OP	600,000	Maks. 3 Orang
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	750,000	Maks. 3 Orang
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	900,000	Maks. 5 Orang
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	1,050,000	Maks. 5 Orang
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	1,150,000	Maks. 5 Orang
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	1,450,000	Maks. 5 Orang
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	1,600,000	Maks. 7 Orang
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	1,750,000	Maks. 7 Orang
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	1,900,000	Maks. 7 Orang
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OP	2,300,000	Maks. 7 Orang
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OP	3,000,000	Maks. 7 Orang
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OP	3,200,000	Maks. 7 Orang
	2.4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 50 juta	Per paket	365,000	Maks. 1 Orang
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	OP	365,000	Maks. 3 Orang
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp. 100 juta	Per paket	365,000	Maks. 3 Orang
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OP	400,000	Maks. 3 Orang
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 200 juta	OP	500,000	Maks. 5 Orang
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	600,000	Maks. 5 Orang
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	750,000	Maks. 5 Orang
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	900,000	Maks. 5 Orang
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	1,000,000	Maks. 7 Orang
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	1,200,000	Maks. 7 Orang
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	1,350,000	Maks. 7 Orang
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	1,450,000	Maks. 7 Orang
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	1,550,000	Maks. 7 Orang
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OP	1,900,000	Maks. 7 Orang
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OP	2,200,000	Maks. 7 Orang
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OP	2,500,000	Maks. 7 Orang
	2.5. HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d Rp. 100 juta	OP	250,000	
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OP	300,000	
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 200 juta	OP	450,000	
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	500,000	
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	600,000	
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	700,000	
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	800,000	
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	1,000,000	
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	1,100,000	
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	1,200,000	
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	1,300,000	
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OP	1,600,000	
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OP	1,900,000	
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OP	2,100,000	
3.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI			
	3.1. UNIT AKUNTANSI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH			
	a. Penanggung Jawab	OB	450,000	
	b. Koordinator	OB	400,000	
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	350,000	
	d. Anggota/Petugas	OB	300,000	
	3.2. UNIT AKUNTANSI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
	a. Penanggung Jawab	OB	300,000	
	b. Koordinator	OB	250,000	
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	200,000	
	d. Anggota/Petugas	OB	150,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH			
	a. Pengurus Barang	OB	250,000	
	b. Pembantu Pengurus Barang	OB	150,000	
5	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN			
	5.1. Pembantu Peneliti	OJ	25,000	
	5.2. Koordinator Peneliti	OB	420,000	
	5.3. Sekretariat Penelitian	OB	300,000	
	5.4. Pengolah Data	Penelitian	1,540,000	
	5.5. Petugas Survey	Org/Responden	8,000	
	5.6. Pembantu Lapangan	OH	80,000	
6	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI			
	6.1. Narasumber/Pembahas :			
	a. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1,000,000	
	b. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	900,000	
	c. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	700,000	
	6.2. Moderator	OJ	600,000	
7	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI			
	7.1. Penanggung Jawab	OK	400,000	
	7.2. Ketua/Wakil Ketua	OK	350,000	
	7.3. Sekretaris	OK	300,000	
	7.4. Anggota	OK	250,000	
8	HONOR PENYULUH NON PNS			
	8.1. SLTA	OB	2,000,000	
	8.2. SARJANA MUDA	OB	2,100,000	
	8.3. SARJANA	OB	2,300,000	
	8.4. MASTER (S2)	OB	2,500,000	
9	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	9.1. Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah			
	9.1.1. Pengarah	OB	750,000	
	9.1.2. Penanggungjawab	OB	700,000	
	9.1.3. Ketua	OB	650,000	
	9.1.4. Wakil Ketua	OB	600,000	
	9.1.5. Sekretaris	OB	500,000	
	9.1.6. Anggota	OB	450,000	
	9.2 Tim Pelaksana Kegiatan SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA			
	9.2.1. Pengarah	OB	500,000	
	9.2.2. Penanggungjawab	OB	450,000	
	9.2.3. Ketua	OB	400,000	
	9.2.4. Wakil Ketua	OB	350,000	
	9.2.5. Sekretaris	OB	300,000	
	9.2.6. Anggota	OB	250,000	
10	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	10.2. Ketua / Wakil Ketua	OB	250,000	
	10.4. Anggota	OB	230,000	
11	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL			
	11.1. Penanggung Jawab	Oter	400,000	
	11.2. Redaktur	Oter	300,000	
	11.3. Penyunting/Editor	Oter	250,000	
	11.4. Desain Grafis & Fotografer	Oter	180,000	
	11.5. Sekretariat	Oter	150,000	
	11.6. Pembuat Artikel	Halaman	100,000	
12.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH			
	12.1. Penanggung Jawab	Oter	400,000	
	12.2. Redaktur	Oter	300,000	
	12.3. Penyunting/Editor	Oter	250,000	
	12.4. Desain Grafis & Fotografer	Oter	180,000	
	12.5. Sekretariat	Oter	150,000	
	12.6. Pembuat Artikel	Halaman	80,000	
13.	HONORARIUM TIM PENYUSUN BUKU			
	13.1. Penanggung Jawab	OB	400,000	
	13.2. Ketua	OB	350,000	
	13.3. Wakil Ketua	OB	300,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	13.4. Anggota	OB	250,000	
	13.5. Receiving Batching	DOK	20,000	
	13.6. Pengumpulan Data	DOK	50,000	
	13.7. Pemeriksa Dokumen	DOK	30,000	
	13.8. Entry Data	DOK	25,000	
	13.9. Tabulasi Tabel Pokok	TABEL	25,000	
	14. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE			
	14.1. Penanggung Jawab	OB	500,000	
	14.2. Redaktur	OB	450,000	
	14.3. Editor	OB	400,000	
	14.4. Web Admin	OB	350,000	
	14.5. Web Developer	OB	300,000	
	14.6. Pembuat artikel	Halaman	100,000	
	14.7. Penerjemah	1500 karakter	90,000	
	15. HONORARIUM PENGELOLA JDIIH			
	14.1. Penanggung Jawab	OB	450,000	
	14.2. Koordinator	OB	400,000	
	14.3. Anggota	OB	350,000	
	14.4. Operator	OB	300,000	
	16. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI			
	16.1. Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan / Pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000	
	c. Pengawas Ujian	OH	240,000	
	16.2. Setingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan / Pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500	
	c. Pengawas Ujian	OH	270,000	
	16.3. Setingkat Pendidikan Tinggi			
	a. Penyusunan / Pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	250,000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	15,000	
	c. Pengawas Ujian	OH	270,000	
	d. Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	150,000	
	e. Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	250,000	
	f. Penguji Desertasi	Orang/Mahasiswa	350,000	
	17. SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)			
	17.1. Golongan I dan II	OH	10,000	
	17.2. Golongan III	OH	12,000	
	17.3. Golongan IV	OH	15,000	
	18. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	18.1. UANG LEMBUR (di luar jam kerja pada hari kerja)			
	a. Golongan I / Non PNS	OJ	10,000	
	b. Golongan II	OJ	13,000	
	c. Golongan III	OJ	17,000	
	d. Golongan IV	OJ	20,000	
	18.2. UANG MAKAN LEMBUR (di luar jam kerja pada hari kerja)			
	a. Golongan I dan II / Non PNS	OH	30,000	
	b. Golongan III	OH	32,000	
	c. Golongan IV	OH	36,000	

19. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS**19.1. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN	
			LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	120,000
11	BANTEN	OH	370,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	130,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	110,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420,000	130,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	120,000
17	BALI	OH	480,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	110,000
27	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	130,000
28	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	110,000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	110,000
30	MALUKU	OH	380,000	110,000
31	MALUKU UTARA	OH	430,000	130,000
32	PAPUA	OH	580,000	170,000
33	PAPUA BARAT	OH	480,000	140,000

**19.2. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
(KHUSUS SULAWESI BARAT)**

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN	
			LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	7
1	MAMUJU	OH	410,000	120,000
2	MAMUJU UTARA	OH	410,000	120,000
3	POLEWALI	OH	410,000	120,000

4	MAMASA	OH	410,000	120,000
5	MAMUJU TENGAH	OH	410,000	120,000

19.3. BIAYA REPRESENTASI

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD Anggota DPRD dan Sekda	OH	200,000
2	Pejabat Eselon II	OH	150,000

20. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM NEGERI

20.1. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON I/II dan disetarakan	PEJABAT ESELON III/GOL. IV dan disetarakan	PEJABAT ESELON IV/GOL. III dan disetarakan	GOLONGAN I/II dan disetarakan
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	1,300,000	850,000	450,000	400,000
2	SUMATERA UTARA	OH	1,214,000	703,000	510,000	310,000
3	RIAU	OH	1,200,000	868,000	450,000	380,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1,300,000	650,000	510,000	280,000
5	JAMBI	OH	1,200,000	740,000	400,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	1,160,000	890,000	520,000	310,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1,250,000	630,000	560,000	340,000
8	LAMPUNG	OH	1,300,000	790,000	400,000	360,000
9	BENGKULU	OH	790,000	720,000	560,000	300,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1,350,000	850,000	400,000	300,000
11	BANTEN	OH	1,430,000	800,000	640,000	400,000
12	JAWA BARAT	OH	1,760,000	800,000	560,000	460,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	1,490,000	870,000	610,000	400,000
14	JAWA TENGAH	OH	1,480,000	850,000	450,000	360,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	1,350,000	810,000	630,000	460,000
16	JAWA TIMUR	OH	1,370,000	850,000	450,000	330,000
17	BALI	OH	1,810,000	990,000	910,000	660,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1,760,000	800,000	580,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1,050,000	750,000	550,000	300,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1,230,000	900,000	430,000	350,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1,560,000	750,000	560,000	350,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1,680,000	820,000	540,000	390,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1,750,000	950,000	550,000	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	1,750,000	620,000	400,000	350,000
25	SULAWESI UTARA	OH	1,560,000	690,000	550,000	370,000
26	GORONTALO	OH	1,150,000	550,000	400,000	260,000
27	SULAWESI SELATAN	OH	1,550,000	810,000	580,000	390,000
28	SULAWESI TENGAH	OH	1,300,000	900,000	520,000	390,000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1,100,000	600,000	450,000	420,000
30	MALUKU	OH	1,030,000	740,000	580,000	410,000
31	MALUKU UTARA	OH	1,520,000	600,000	480,000	380,000
32	PAPUA	OH	1,670,000	760,000	460,000	414,000
33	PAPUA BARAT	OH	1,490,000	760,000	500,000	370,000

20.2. LUAR DAERAH (KHUSUS SULAWESI BARAT)

NO	KABUPATEN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/WAKIL BUPATI DAN UNSUR PIMPINAN DPRD, PEJABAT ESELON I/II dan disetarakan	PEJABAT ESELON III/GOL. IV dan disetarakan	PEJABAT ESELON IV/GOL. III dan disetarakan	GOLONGAN I/II dan disetarakan
1	2	3	4	5	6	7
1	MAMUJU	OH	1,030,000	860,000	400,000	360,000
2	MAMUJU UTARA	OH	1,030,000	860,000	400,000	360,000
3	POLEWALI	OH	800,000	650,000	300,000	200,000
4	MAMASA	OH	800,000	650,000	300,000	200,000
5	MAMUJU TENGAH	OH	1,030,000	860,000	400,000	360,000

20.3. DALAM DAERAH (WILAYAH KABUPATEN MAJENE)

NO	KECAMATAN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/WAKIL BUPATI DAN UNSUR PIMPINAN DPRD, PEJABAT ESELON I/II dan disetarakan	PEJABAT ESELON III/GOL. IV dan disetarakan	PEJABAT ESELON IV/GOL. III dan disetarakan	GOLONGAN I/II dan disetarakan
1	2	3	4	5	6	7
1	Banggae & Banggae Timur	OH	800,000	700,000	300,000	270,000
2	Pamboang	OH	750,000	650,000	250,000	225,000
3	Sendana	OH	700,000	600,000	250,000	225,000
4	Tammeroddo Sendana	OH	650,000	550,000	240,000	216,000
5	Tubo Sendana	OH	600,000	500,000	240,000	216,000
6	Malunda	OH	550,000	450,000	170,000	153,000
7	Ulumanda	OH	500,000	400,000	170,000	153,000

21. SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DALAM DAERAH

No	Tujuan	Pejabat / Aparat	Uang Harian (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Banggae & Banggae Timur	Bupati/Ketua DPRD	275,000	
		Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD	275,000	
		Eselon II/A Anggota DPRD	275,000	
		Sekda	275,000	
		Eselon II/B	250,000	
		Eselon III/A	250,000	
		Eselon III/B	250,000	
		Eselon IV / Golongan IV	250,000	
		Eselon V / Golongan III	200,000	
		Non Eselon / Golongan II dan I	150,000	
Pegawai Kontrak (Data Base BKN)	150,000			
Ajudan / Sopir	150,000			
2	Pamboang	Bupati/Ketua DPRD	275,000	
		Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD	275,000	
		Eselon II/A Anggota DPRD	275,000	
		Sekda	275,000	
		Eselon II/B	250,000	
		Eselon III/A	250,000	
		Eselon III/B	250,000	
		Eselon IV / Golongan IV	250,000	
		Eselon V / Golongan III	200,000	
		Non Eselon / Golongan II dan I	150,000	
Pegawai Kontrak (Data Base BKN)	150,000			
Ajudan / Sopir	150,000			
3	Sendana	Bupati/Ketua DPRD	275,000	
		Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD	275,000	
		Eselon II/A Anggota DPRD	275,000	
		Sekda	275,000	
		Eselon II/B	250,000	
		Eselon III/A	250,000	
		Eselon III/B	250,000	
		Eselon IV / Golongan IV	250,000	
		Eselon V / Golongan III	200,000	
		Non Eselon / Golongan II dan I	150,000	
Pegawai Kontrak (Data Base BKN)	150,000			
Ajudan / Sopir	150,000			
4	Tammeroddo Sendana	Bupati/Ketua DPRD	-	
		Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD	-	
		Eselon II/A Anggota DPRD	-	
		Sekda	-	
		Eselon II/B	-	
		Eselon III/A	200,000	
Eselon III/B	200,000			

1	2	3	4	5
		Eselon IV / Golongan IV Eselon V / Golongan III Non Eselon / Golongan II dan I Pegawai Kontrak (Data Base BKN) Ajudan / Sopir	175,000 175,000 150,000 150,000 150,000	
5	Tubo Sendana	Bupati/Ketua DPRD Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD Eselon II/A Anggota DPRD Sekda Eselon II/B Eselon III/A Eselon III/B Eselon IV / Golongan IV Eselon V / Golongan III Non Eselon / Golongan II dan I Pegawai Kontrak (Data Base BKN) Ajudan/Supir	- - - - - 250,000 250,000 - 200,000 150,000 150,000 150,000	
6	Malunda	Bupati/Ketua DPRD Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD Eselon II/A Anggota DPRD Sekda Eselon II/B Eselon III/A Eselon III/B Eselon IV / Golongan IV Eselon V / Golongan III Non Eselon / Golongan II dan I Pegawai Kontrak (Data Base BKN) Ajudan / Sopir	- - - - - 250,000 250,000 - 200,000 150,000 150,000 150,000	
7	Ulumanda	Bupati/Ketua DPRD Wakil Bupati / Wkl.Ketua DPRD Eselon II/A Anggota DPRD Sekda Eselon II/B Eselon III/A Eselon III/B Eselon IV / Golongan IV Eselon V / Golongan III Non Eselon / Golongan II dan I Pegawai Kontrak (Data Base BKN) Ajudan / Sopir	- - - - - - - - - - - 150,000 150,000	

- Untuk perjalanan dinas dalam daerah khusus untuk wilayah Kec. Banggae dan Kec. Banggae Timur dapat sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota.

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2015	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL			
	1.1. Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkt	30,261,000	
	1.2. Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkt	25,500,000	
	1.3. Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkt	22,500,000	
2.	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	2.1. Golongan III	Peserta/Angkt	4,470,000	
	2.2. Golongan I & II	Peserta/Angkt	5,545,000	
3.	MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			
	3.1. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	Pegawai/Tahun	12,000	
	Catatan :			
	Diberikan terbatas kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, petugas foto x-ray (rumah sakit), dan petugas beresiko tinggi lainnya			
4.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	4.1. RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN			
	a. Makan	Org/kali	30,000	
	b. Kudapan (snack)	Org/kali	15,000	
	4.2. RAPAT BIASA			
	a. Makan	Org/kali	20,000	
	b. Kudapan (snack)	Org/kali	10,000	
5.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	5.1. Pasien Rumah Sakit	OH	36,000	
	5.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	30,000	
	5.3. Mahasiswa/Siswa Sipil	OH	36,000	
	5.4. Mahasiswa Militer/Semi Militer	OH	41,000	
	5.5. ABK Aktif	OH	25,000	
	5.6. ABK Cadangan	OH	25,000	
	5.7. Rescue Team	OH	25,000	
	5.8. Pengamat Laut	OH	25,000	
6.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
	6.1. Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan Pejabat Negara	Unit / Tahun	36,850,000	
	b. Kendaraan Roda 6 & Speedboat	Unit / Tahun	21,970,000	
	c. Kendaraan Operasional Roda 2	Unit / Tahun	3,260,000	
	d. Kendaraan Operasional Roda 4	Unit / Tahun	32,060,000	
	e. Kendaraan Operasional Double Gardan	Unit / Tahun	34,130,000	
	6.2. Kendaraan Operional Patroli Jalan Raya (PJR)			
	a. PJR Roda 4	Unit / Tahun	72,880,000	
	b. PJR Roda 250 CC	Unit / Tahun	17,740,000	
	c. PJR Roda 750 CC	Unit / Tahun	32,170,000	
7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	7.1. Inventaris Kantor	Pegawai / Tahun	70,000	
	7.2. Personal Komputer (PC) / Notebook	Unit / Tahun	630,000	
	7.3. Printer	Unit / Tahun	600,000	
	7.4. AC Split	Unit / Tahun	530,000	
	7.5. Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit / Tahun	6,250,000	
	7.6. Genset 75 KVA	Unit / Tahun	7,500,000	
	7.7. Genset 100 KVA	Unit / Tahun	8,820,000	
	7.8. Genset 125 KVA	Unit / Tahun	9,360,000	
	7.9. Genset 150 KVA	Unit / Tahun	11,520,000	
	7.10. Genset 175 KVA	Unit / Tahun	12,860,000	
	7.11. Genset 200 KVA	Unit / Tahun	13,770,000	
	7.12. Genset 250 KVA	Unit / Tahun	14,550,000	
	7.13. Genset 275 KVA	Unit / Tahun	15,430,000	
	7.14. Genset 300 KVA	Unit / Tahun	18,200,000	
	7.15. Genset 350 KVA	Unit / Tahun	19,940,000	

1	2	3	4	5
	7.16. Genset 450 KVA	Unit / Tahun	22,250,000	
	7.17. Genset 500 KVA	Unit / Tahun	27,590,000	
8.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEA SISWA			
	8.1. Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata I			
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Diploma I dan Diploma III	OT	15,300,000	
	- Diploma IV dan Strata I	OT	16,200,000	
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun			
	- Diploma I	OT	1,250,000	
	- Diploma III	OT	1,500,000	
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1,750,000	
	8.2. Proram Sarana 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2			
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	19,700,000	
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	20,300,000	
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun			
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2,000,000	
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2,250,000	
9.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI			
	a. Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3,800,000	
	b. Mesin Fotokopi Digital	Bulan/Unit	5,000,000	
10.	HONORARIUM NARASUMBER UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI			
	a. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1,500,000	
11.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN			
	11.1. Gedung Bertingkat	M2 / Tahun	193,000	
	11.2. Gedung Tidak Bertingkat	M2 / Tahun	143,000	
	11.3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2 / Tahun	11,000	
12.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
	12.1. Sewa Gedung Pertemuan	Perhari	4,000,000	
13.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN			
	13.1. Roda 4	Unit/Hari	650,000	
	13.2. Roda 6/Bus Sedang	Unit/Hari	1,800,000	
	13.3. Roda 6/Bus Besar	Unit/Hari	2,800,000	
14.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL			
	14.1. Pejabat Negara	Unit	411,080,000	
	14.2. Operasional Kantor / Lapangan			
	a. Bus Roda 6	Unit	1,138,896,000	
	b. Roda 6 / Tiga per Empat	Unit	563,360,000	
	c. Roda 4 / Minibus	Unit	334,670,000	
	d. Pick Up	Unit	204,200,000	
	e. Double Gardan	Unit	468,830,000	
	f. Roda 2 Operasional Kantor	Unit	19,690,000	
	g. Roda 2 Lapangan	Unit	32,360,000	
15.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN/ATAU KERJA			
	a. Pakaian Kerja Dokter	Org/Thn/Stel	610,000	
	b. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Org/Thn/Stel	460,000	
	c. Pakaian Seragam Mahasiswa/i	Org/Thn/Stel	400,000	
	d. Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	Org/Thn/Stel	390,000	
	e. Pakaian Kerja Satpam	Org/Thn/Stel	850,000	

16 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT DAN BUS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

16.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	7
1	JAKARTA	AMBON	13,285,000	7,081,000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7,412,000	3,797,000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7,519,000	4,492,000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2,407,000	1,583,000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5,252,000	2,995,000
6	JAKARTA	BATAM	4,867,000	2,888,000
7	JAKARTA	BENGGULU	4,364,000	2,621,000
8	JAKARTA	BIAK	14,065,000	7,519,000
9	JAKARTA	DENPASAR	5,305,000	3,262,000
10	JAKARTA	GORONTALO	7,231,000	4,824,000
11	JAKARTA	JAMBI	4,065,000	2,460,000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14,568,000	8,193,000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4,107,000	2,268,000
14	JAKARTA	KENDARI	7,658,000	4,182,000
15	JAKARTA	KUPANG	9,413,000	5,081,000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7,444,000	3,829,000
17	JAKARTA	MALANG	4,599,000	2,695,000
18	JAKARTA	MAMUJU	7,295,000	4,867,000
19	JAKARTA	MANADO	10,824,000	5,102,000
20	JAKARTA	MANOKRAWI	16,226,000	10,824,000
21	JAKARTA	MATARAM	5,316,000	3,230,000
22	JAKARTA	MEDAN	7,252,000	3,808,000
23	JAKARTA	PADANG	5,530,000	2,952,000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4,984,000	2,984,000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3,861,000	2,268,000
26	JAKARTA	PALU	9,348,000	5,113,000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3,412,000	2,139,000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5,583,000	3,016,000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4,353,000	2,781,000
30	JAKARTA	SEMARANG	3,861,000	2,182,000
31	JAKARTA	SOLO	3,861,000	2,342,000
32	JAKARTA	SURABAYA	5,466,000	2,674,000
33	JAKARTA	TERNATE	10,001,000	6,664,000
34	JAKARTA	TIMIKA	13,830,000	7,487,000
35	AMBON	DENPASAR	8,054,000	4,471,000
36	AMBON	JAYAPURA	7,434,000	4,161,000
37	AMBON	KENDARI	4,824,000	2,856,000
38	AMBON	MAKASSAR	6,022,000	3,455,000
39	AMBON	MANOKRAWI	5,177,000	3,027,000
40	AMBON	PALU	6,140,000	3,508,000
41	AMBON	SORONG	3,637,000	2,257,000
42	AMBON	SURABAYA	8,803,000	4,845,000
43	AMBON	TERNATE	4,022,000	2,449,000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12,739,000	6,749,000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10,354,000	5,305,000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10,739,000	5,648,000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19,071,000	10,086,000
48	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9,669,000	4,749,000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12,664,000	6,150,000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15,702,000	7,295,000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12,493,000	6,140,000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10,942,000	5,369,000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9,445,000	4,749,000

1	2	3	4	7
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10,996,000	5,423,000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9,445,000	4,674,000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9,445,000	4,813,000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10,889,000	5,113,000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18,408,000	9,445,000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10,835,000	6,279,000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19,167,000	10,717,000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9,765,000	5,380,000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12,760,000	6,781,000
63	BANDA ACEH	MANADO	15,798,000	7,926,000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9,990,000	5,840,000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9,530,000	5,305,000
66	BANDA ACEH	SOLO	9,530,000	5,444,000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10,985,000	5,744,000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18,504,000	10,076,000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8,129,000	4,129,000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8,225,000	4,760,000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6,193,000	3,412,000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5,840,000	3,316,000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14,119,000	7,487,000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6,236,000	3,647,000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14,568,000	8,097,000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5,155,000	2,760,000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8,354,000	4,482,000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8,161,000	4,161,000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5,594,000	3,134,000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11,199,000	5,305,000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6,246,000	3,626,000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7,979,000	4,150,000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6,439,000	3,380,000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5,947,000	3,401,000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4,931,000	2,760,000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6,482,000	3,433,000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5,380,000	3,220,000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4,931,000	2,685,000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4,931,000	2,824,000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6,386,000	3,123,000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13,905,000	7,455,000
92	BANDUNG	BATAM	6,289,000	3,583,000
93	BANDUNG	DENPASAR	5,626,000	3,252,000
94	BANDUNG	JAKARTA	2,064,000	1,476,000
95	BANDUNG	JAMBI	5,006,000	2,941,000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	3,369,000	2,129,000
97	BANDUNG	PADANG	6,129,000	3,508,000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4,385,000	2,631,000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4,599,000	2,738,000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6,525,000	3,701,000
101	BANDUNG	SEMARANG	3,027,000	1,957,000
102	BANDUNG	SOLO	3,647,000	2,268,000
103	BANDUNG	SURABAYA	4,824,000	2,856,000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4,439,000	2,663,000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10,792,000	6,022,000
106	BANJARMASIN	BATAM	8,407,000	4,578,000
107	BANJARMASIN	BIAK	16,686,000	8,749,000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8,792,000	4,920,000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17,135,000	9,359,000
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7,723,000	4,022,000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10,546,000	5,412,000
112	BANJARMASIN	PADANG	9,006,000	4,642,000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7,498,000	4,022,000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9,049,000	4,696,000

1	2	3	4	7
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7,498,000	3,958,000
116	BANJARMASIN	SOLO	7,498,000	4,097,000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8,942,000	4,385,000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16,472,000	8,717,000
119	BATAM	BANDA ACEH	10,439,000	5,936,000
120	BATAM	DENPASAR	8,450,000	4,824,000
121	BATAM	JAYAPURA	16,782,000	9,263,000
122	BATAM	JOGJAKARTA	7,370,000	3,936,000
123	BATAM	MAKASSAR	10,375,000	5,337,000
124	BATAM	MANADO	13,413,000	6,482,000
125	BATAM	MEDAN	10,193,000	5,316,000
126	BATAM	PADANG	8,653,000	4,546,000
127	BATAM	PALEMBANG	7,145,000	3,936,000
128	BATAM	PEKANBARU	8,707,000	4,599,000
129	BATAM	PONTIANAK	7,594,000	4,396,000
130	BATAM	SEMARANG	7,145,000	3,861,000
131	BATAM	SOLO	7,145,000	4,000,000
132	BATAM	SURABAYA	8,600,000	4,300,000
133	BATAM	TIMIKA	16,119,000	8,621,000
134	BENGGULU	PALEMBANG	2,899,000	1,893,000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18,622,000	9,477,000
136	BIAK	BANDA ACEH	18,718,000	10,108,000
137	BIAK	BATAM	16,333,000	8,664,000
138	BIAK	DENPASAR	16,729,000	8,995,000
139	BIAK	JAYAPURA	3,615,000	2,321,000
140	BIAK	JOGJAKARTA	15,648,000	8,108,000
141	BIAK	MANADO	11,734,000	6,353,000
142	BIAK	MEDAN	18,472,000	9,498,000
143	BIAK	PADANG	16,932,000	8,728,000
144	BIAK	PALEMBANG	15,424,000	8,108,000
145	BIAK	PEKANBARU	16,985,000	8,781,000
146	BIAK	PONTIANAK	15,873,000	8,568,000
147	BIAK	SURABAYA	12,782,000	7,081,000
148	BIAK	TIMIKA	5,808,000	3,444,000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11,680,000	6,845,000
150	DENPASAR	KUPANG	5,091,000	2,952,000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4,182,000	2,631,000
152	DENPASAR	MANADO	7,851,000	4,278,000
153	DENPASAR	MATARAM	1,840,000	1,390,000
154	DENPASAR	MEDAN	10,589,000	5,658,000
155	DENPASAR	PADANG	9,049,000	4,888,000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8,557,000	4,909,000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7,541,000	4,278,000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9,092,000	4,942,000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7,990,000	4,738,000
160	DENPASAR	TIMIKA	10,140,000	6,129,000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7,733,000	4,407,000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7,690,000	4,193,000
163	JAMBI	DENPASAR	7,733,000	4,439,000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6,653,000	3,551,000
165	JAMBI	KUPANG	11,434,000	6,075,000
166	JAMBI	MAKASSAR	9,659,000	4,952,000
167	JAMBI	MALANG	7,091,000	3,925,000
168	JAMBI	MANADO	12,707,000	6,097,000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7,444,000	4,193,000
170	JAMBI	PONTIANAK	6,878,000	4,011,000
171	JAMBI	SEMARANG	6,428,000	3,476,000
172	JAMBI	SOLO	6,428,000	3,615,000
173	JAMBI	SURABAYA	7,883,000	3,915,000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13,274,000	7,690,000
175	JAYAPURA	MANADO	22,109,000	11,263,000

1	2	3	4	7
176	JAYAPURA	MEDAN	18,932,000	10,097,000
177	JAYAPURA	PADANG	17,381,000	9,327,000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15,873,000	8,717,000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17,435,000	9,380,000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16,322,000	9,177,000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3,615,000	2,289,000
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	3,861,000	2,481,000
183	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6,525,000	3,893,000
184	JOGJAKARTA	MANADO	10,536,000	5,722,000
185	JOGJAKARTA	MEDAN	9,519,000	4,770,000
186	JOGJAKARTA	PADANG	7,969,000	4,000,000
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6,460,000	3,380,000
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8,022,000	4,054,000
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6,910,000	3,840,000
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	11,894,000	7,038,000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12,953,000	7,102,000
192	KENDARI	BATAM	10,568,000	5,658,000
193	KENDARI	DENPASAR	5,455,000	3,273,000
194	KENDARI	JOGJAKARTA	8,129,000	4,706,000
195	KENDARI	PADANG	11,167,000	5,722,000
196	KENDARI	PALEMBANG	9,659,000	5,102,000
197	KENDARI	PEKANBARU	11,220,000	5,776,000
198	KENDARI	SEMARANG	9,659,000	5,027,000
199	KENDARI	SOLO	9,659,000	5,166,000
200	KENDARI	SURABAYA	11,103,000	5,466,000
201	KENDARI	TIMIKA	18,633,000	9,798,000
202	KUPANG	JAYAPURA	14,386,000	8,108,000
203	KUPANG	JOGJAKARTA	7,348,000	4,182,000
204	KUPANG	MAKASSAR	7,637,000	4,311,000
205	KUPANG	MANADO	11,648,000	6,140,000
206	KUPANG	SURABAYA	6,749,000	3,722,000
207	MAKASSAR	BIAK	8,493,000	4,931,000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10,193,000	5,787,000
209	MAKASSAR	KENDARI	2,663,000	1,786,000
210	MAKASSAR	MANADO	5,327,000	2,909,000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11,723,000	6,567,000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10,108,000	5,134,000
213	MALANG	BANDA ACEH	10,204,000	5,765,000
214	MALANG	BANJARMASIN	8,161,000	4,407,000
215	MALANG	BATAM	7,819,000	4,311,000
216	MALANG	BIAK	16,087,000	8,482,000
217	MALANG	JAYAPURA	16,536,000	9,092,000
218	MALANG	KENDARI	10,322,000	5,487,000
219	MALANG	MAKASSAR	10,129,000	5,166,000
220	MALANG	MANADO	13,167,000	6,311,000
221	MALANG	MEDAN	9,958,000	5,145,000
222	MALANG	PADANG	8,418,000	4,385,000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7,915,000	4,407,000
224	MALANG	PALEMBANG	6,899,000	3,765,000
225	MALANG	PEKANBARU	8,461,000	4,439,000
226	MALANG	TIMIKA	15,873,000	8,461,000
227	MANADO	MEDAN	15,552,000	7,316,000
228	MANADO	PADANG	14,012,000	6,546,000
229	MANADO	PALEMBANG	12,504,000	5,926,000
230	MANADO	PEKANBARU	14,055,000	6,599,000
231	MANADO	PONTIANAK	12,953,000	6,396,000
232	MANADO	SEMARANG	12,504,000	5,851,000
233	MANADO	SOLO	12,504,000	5,990,000
234	MANADO	SURABAYA	9,937,000	5,262,000
235	MANADO	TIMIKA	16,183,000	8,995,000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10,750,000	5,615,000

1	2	3	4	7
237	MATARAM	BANDA ACEH	10,846,000	6,246,000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8,803,000	4,888,000
239	MATARAM	BATAM	8,461,000	4,803,000
240	MATARAM	BIAK	11,552,000	6,546,000
241	MATARAM	JAYAPURA	13,092,000	7,327,000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	4,417,000	2,781,000
243	MATARAM	MAKASSAR	4,717,000	2,909,000
244	MATARAM	MANADO	8,717,000	4,738,000
245	MATARAM	MEDAN	10,600,000	5,637,000
246	MATARAM	PADANG	9,060,000	4,867,000
247	MATARAM	PALEMBANG	7,551,000	4,246,000
248	MATARAM	PEKANBARU	9,102,000	4,909,000
249	MATARAM	PONTIANAK	8,001,000	4,706,000
250	MATARAM	SURABAYA	3,829,000	2,321,000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3,466,000	2,193,000
252	MEDAN	MAKASSAR	12,514,000	6,172,000
253	MEDAN	PONTIANAK	9,733,000	5,230,000
254	MEDAN	SEMARANG	9,284,000	4,696,000
255	MEDAN	SOLO	9,284,000	4,835,000
256	MEDAN	SURABAYA	10,739,000	5,134,000
257	MEDAN	TIMIKA	18,258,000	9,455,000
258	PADANG	MAKASSAR	10,974,000	5,402,000
259	PADANG	PONTIANAK	8,193,000	4,460,000
260	PADANG	SEMARANG	7,744,000	3,925,000
261	PADANG	SOLO	7,744,000	4,065,000
262	PADANG	SURABAYA	9,199,000	4,364,000
263	PADANG	TIMIKA	16,718,000	8,685,000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10,546,000	6,022,000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8,161,000	4,578,000
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7,477,000	4,022,000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8,557,000	4,888,000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10,300,000	5,412,000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8,760,000	4,642,000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7,252,000	4,022,000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8,803,000	4,696,000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7,252,000	3,947,000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7,252,000	4,086,000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8,696,000	4,385,000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9,894,000	5,220,000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9,466,000	4,781,000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6,685,000	3,480,000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6,236,000	3,305,000
279	PALEMBANG	SOLO	6,236,000	3,444,000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7,690,000	3,744,000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15,210,000	8,076,000
282	PALU	MAKASSAR	4,268,000	2,578,000
283	PALU	POSO	1,957,000	1,423,000
284	PALU	SORONG	6,878,000	3,883,000
285	PALU	SURABAYA	6,878,000	3,883,000
286	PALU	TOLI-TOLI	2,941,000	1,915,000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9,038,000	4,631,000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7,091,000	3,915,000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6,739,000	3,818,000
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6,065,000	3,262,000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9,060,000	4,663,000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12,097,000	5,808,000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8,888,000	4,653,000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7,337,000	3,883,000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5,829,000	3,262,000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7,391,000	3,936,000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6,279,000	3,733,000

1	2	3	4	7
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5,829,000	3,187,000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5,829,000	3,326,000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7,284,000	3,626,000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8,247,000	4,514,000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7,797,000	3,979,000
303	PEKANBARU	SOLO	7,797,000	4,118,000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9,241,000	4,407,000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16,771,000	8,739,000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9,915,000	5,241,000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6,685,000	3,765,000
308	PONTIANAK	SOLO	6,685,000	3,904,000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8,140,000	4,204,000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15,659,000	8,535,000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9,466,000	4,706,000
312	SOLO	MAKASSAR	9,466,000	4,845,000
313	SURABAYA	DENPASAR	3,198,000	1,979,000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12,675,000	7,231,000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5,936,000	3,433,000
316	SURABAYA	TIMIKA	11,295,000	6,589,000

17 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**17.1 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN LUAR DAERAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI
1	2	3	4
1	ACEH	OK	120,000
2	SUMATERA UTARA	OK	232,000
3	RIAU	OK	75,000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	120,000
5	JAMBI	OK	120,000
6	SUMATERA BARAT	OK	190,000
7	SUMATERA SELATAN	OK	125,000
8	LAMPUNG	OK	145,000
9	BENGKULU	OK	95,000
10	BANGKA BELITUNG	OK	90,000
11	BANTEN	OK	306,000
12	JAWA BARAT	OK	140,000
13	D.K.I JAKARTA	OK	170,000
14	JAWA TENGAH	OK	75,000
15	D.I YOGYAKARTA	OK	94,000
16	JAWA TIMUR	OK	148,000
17	BALI	OK	150,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	213,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	80,000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	107,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	90,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	100,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	80,000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	75,000
25	SULAWESI UTARA	OK	110,000
26	GORONTALO	OK	200,000
27	SULAWESI BARAT	OK	217,000
28	SULAWESI SELATAN	OK	145,000
29	SULAWESI TENGAH	OK	75,000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	131,000
31	MALUKU	OK	210,000
32	MALUKU UTARA	OK	174,000
33	PAPUA	OK	355,000
34	PAPUA BARAT	OK	145,000

17.2 BIAYA ANGKUTAN DALAM KOTA WILAYAH SULBAR

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI
1	2	3	4
1	MAMUJU	OK	217,000
2	MAMUJU UTARA	OK	175,000
3	POLEWALI	OK	175,000
4	MAMASA	OK	175,000
5	MAMUJU TENGAH	OK	175,000

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA